

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PARTAI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN
ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUSTASYAR
NIM. 150801042**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**ROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mustasyar
NIM : 150801042
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Kota Fajar, 07 Desember 1996
Alamat : Dusun Makmur, Pulo Kambing Kecamatan Kluet
Utara Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab ataskarya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,




Mustasyar
NIM. 150801042

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PARTAI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN
ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik

Oleh:
MUSTASYAR
NIM: 150801042

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Eka Januar, M.Soc. Sc.
NIP: 198401012015031003


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP: 198812072018032001

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PARTAI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN
ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022

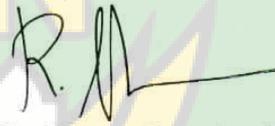
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Januar, M.Soc. Sc.
NIP: 198401012015031003

Sekretaris,



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP: 198812072018032001

Penguji I,



Muhammad Thalal, Lc, M.Ed. M.Si.
NIP: 197810162008011011

Penguji II,



Melly Masni, M.IR
NIP: 199305242020122016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Selatan, memperlihatkan berbagai masalah dari partai politik dan kadernya yang berupaya memenangkan calon kandidat masing-masing, di antaranya permasalahan *money politik*, pemanfaatan tokoh agama di kalangan pimpinan dayah dan lain sebagainya. Praktek politik semacam ini tentu membuat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, khususnya yang ada di Kecamatan Kluet Utara memberikan pandangan tersendiri terhadap partai-partai politik yang terlibat dalam Pilkada Aceh Selatan tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan (2) faktor apa yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian ini terdiri aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) persepsi masyarakat pemilih terhadap Partai Politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang memiliki persepsi baik dan sebagian tidak memberikan pandangan positif terhadap partai politik. Masyarakat yang berpandangan positif memberikan dukungan penuh terhadap Partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Persepsi masyarakat yang baik ini didukung dengan adanya pandangan masyarakat terhadap perilaku elit politik dimasa kampanye baik marketing politiknya, kepribadian tokoh partai dan pengalaman masyarakat terhadap kepemimpinan sebelumnya dari partai bersangkutan. Sedangkan persepsi masyarakat yang negatif melihat berbagai kekurangan dari Partai politik seperti komunikasi dan pesan politik yang tidak baik, peran partai masih minim dalam pembangunan dan lain sebagainya. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kluet Utara terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan antara lain program serta visi dan misi partai selama kampanye lebih menjanjikan dan meyakinkan pemilih, kedekatan emosional dan religius yang kuat di kalangan elit partai, kedarmawanan pasangan calon yang diusung partai, kesamaan daerah dan suku serta adanya imbalan berupa uang dan fasilitas lainnya.

Kata Kunci: *Pandangan, Masyarakat, Partai Pilkada Kabupaten Aceh Selatan*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

E. Teori Persepsi/Pandangan Masyarakat	6
1. Pengertian Persepsi	6
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	8
3. Bentuk-Bentuk Persepsi	8
4. Proses dan Sifat Persepsi.....	11
F. Partai Politik	15
1. Pengertian Partai Politik	15
2. Fungsi Partai Politik	17
3. Tujuan Partai Politik.....	20
G. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah	23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Objek dan Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kluet Utara	40
B. Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.....	42
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	44
D. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terhadap Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA..... 63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu memiliki tiga tujuan utama yaitu: pertama, sebagai mekanisme penyeleksian para pemimpin pemerintahan dan alternatif pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Kedua, Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ketiga, Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik.¹

Pemilu identik dengan pemilihan kepala suatu pemerintahan, jika di daerah istilah Pemilu lebih di kenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam penyelenggaraannya, Pilkada menjadi sangat penting dalam kontestasi demokrasi, seseorang yang memiliki modal, popularitas dan figur tentunya akan mampu bersaing di Pilkada. Modal utama yang harus dipersiapkan yaitu membangun relasi dan kepercayaan yang di miliki oleh pasangan calon yang ingin mengikuti Pilkada dengan masyarakat yang memilih.

Partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Suksesnya tahapan pemilu

¹ Prihatmoko, *Mendemokraskan Pemilu Dari Sistem Sampai ke Teknik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19.

tergantung kepada keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan, apabila masyarakat tidak memiliki partisipasi politik dalam pemilu maka tidak akan terlaksananya suatu proses pergantian kekuasaan.²

Tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu di antaranya memiliki tahapan kampanye. Kampanye merupakan suatu usaha dalam mempengaruhi masyarakat atau pemilih secara tidak memaksa yang bersifat membujuk pemilih secara halus agar pemilih yakin terhadap kandidat yang melakukan kampanye politiknya atau disebut secara persuasif melalui kegiatan-kegiatan komunikasi massa, publik relasi, negosiasi serta lain-lainnya.

Aceh Selatan merupakan kabupaten yang ikut merayakan pesta demokrasi pilkada secara langsung tahapan kedua bertepatan pada tanggal 27 juni 2018 yang diikuti oleh dua kabupaten dan satu kota di provinsi Aceh di antaranya kota Subulussalam, kabupaten Aceh Selatan dan kabupaten Pidie Jaya. Pemilihan kepala daerah serentak yang pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 peserta yang mengikuti terdiri dari dua puluh kabupaten kota yang ada di Aceh.

Rapat pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan memutuskan tujuh pasangan calon kandidat yang ikut berkopetensi pada Pilkada, di antara tujuh pasangan tersebut yaitu : pasangan no urut satu Tgk Husen Yusuf S.Pdi – DR Mustafa, M.Si, no urut dua pasangan H Azwir, S.Sos – Tgk Amran, no urut tiga pasangan Drs Zulkarnaini, M.Si – M Jasa, no urut empat pasangan Darman, S.P, MM – Baital Makmur, S.E, no urut lima pasangan HT Sama Indra, S.H – Drs

² Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*. (Jakarta: Gramedia. 2010), h. 367.

H. Harmaini, M.Si, no urut enam pasangan H. Mirwan, M.S,S.E – Zirhan, S.P, dan pasangan no urut tujuh H.Karman BA, S.E – Afdhal Yasin.³

Para pasangan calon tersebut kemudian didukung oleh berbagai partai politik, baik partai politik local maupun nasional. Para politikus partai dalam Pilkada Aceh Selatan 2017 dalam mencari dukungan melakukan berbagai kegiatan politik seperti kampanye sehingga melibatkan berbagai kalangan masyarakat.

Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan ini melibatkan berbagai pemilih dari kalangan masyarakat termasuk pemilih pemula. Di Kecamatan Kleut Utara sendiri jumlah partisipasi pemilih keseluruhan mencapai 16.349 orang yang terdiri dari 8049 pemilih laki-laki dan 8.300 pemilih perempuan, sedangkan jika dilihat partisipasi pemilih pemula mencapai 4.17 pemilih pemula berumur 17 – 18 dan pemilih pemula yang berumur 18 – 21 berjumlah 1.231.⁴

Sangat banyak permasalahan yang terjadi dalam tahapan proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Selatan, di antaranya permasalahan Praktik *money politik*, pemanfaatan tokoh agama di kalangan pimpinan dayah dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu kasus tersembunyi yang dilakukan oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati Aceh Selatan. Praktek politik semacam ini tentu membuat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, khususnya yang ada di Kecamatan Kluet Utara memberikan pandangan tersendiri terhadap partai-partai politik yang terlibat dalam Pilkada Aceh Selatan tersebut.

³ <http://aceh.tribunnews.com>, di akses pada 19 April 2021.

⁴ Sumber: DPT Kecamatan Kluet Utara, 2021

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pandangan Masyarakat terhadap Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

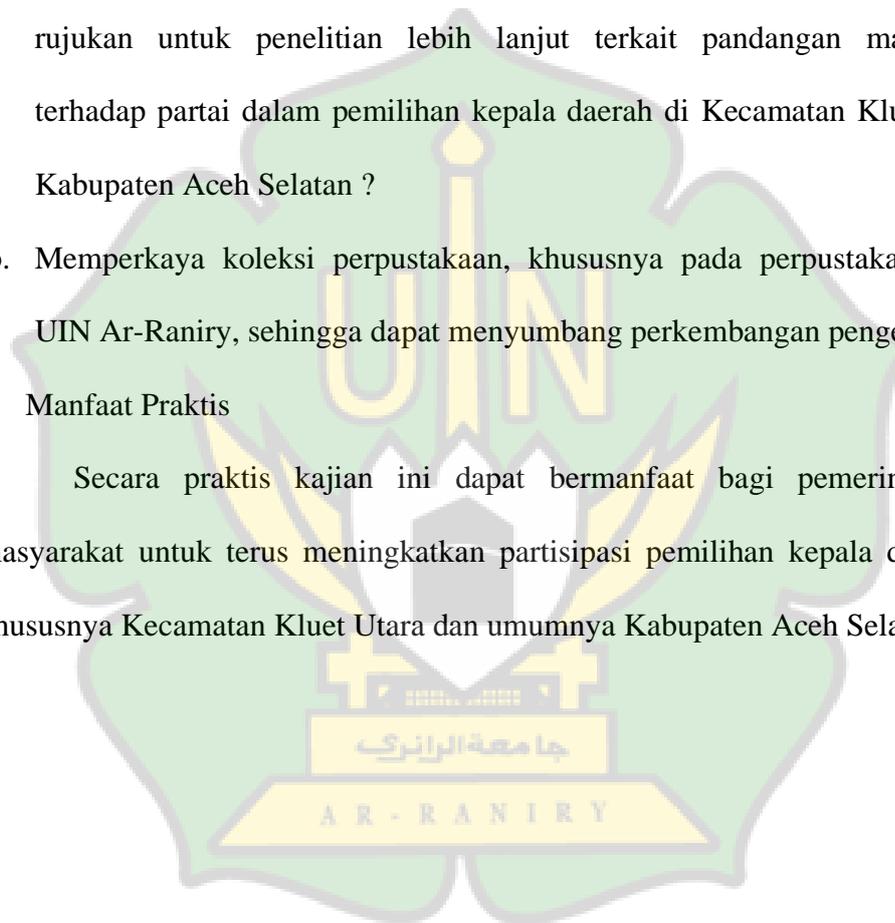
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kajian ini dapat bermanfaat:

- a. Penambah wawasan pengetahuan politik sebagai serta dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ?
- b. Memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya pada perpustakaan FSIP UIN Ar-Raniry, sehingga dapat menyumbang perkembangan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah di khususnya Kecamatan Kluet Utara dan umumnya Kabupaten Aceh Selatan.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Persepsi/Pandangan Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.⁵ Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.⁶

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.⁷ Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan *stimuli inderawi* mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis komunikasi.⁸

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 201

⁶ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 2.

⁷ Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hlm. 12

⁸ Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 32

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli inderawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi.⁹ Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹⁰

Philip kottler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.¹¹ Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan.¹² Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur

⁹ Drever, *Persepsi Siswa*. (Bandung: Grafindo, 2010), h. 19.

¹⁰ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 99

¹¹ Philip kottler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 164

¹² Joyce Marcella Laurence, *Arsitektur dan Prilaku Manusia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 56

yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak, meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderaan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.

¹³ Oman sukmana, *Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan* (Malang: UMM Pres, 2003), h. 31.

2. Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
3. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
4. Konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekali pun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.¹⁴

Gifford dalam Ariyanti, juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:¹⁵

1. Personal Effect

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang

¹⁴ Pieter Merri Zan dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 40.

¹⁵ Elisa Ariyanti, *Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Public Yang Kreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah*, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, 2005

menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

2. Cultural Effect

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

3. Physical Effect

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni minat, kepentingan, kebiasaan dan konstansi. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi

ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

(1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor.¹⁶ Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda bergerak, sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi kekeliruan dalam

¹⁶ Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...h, 40.

memersepsi.¹⁷ Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

(3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian, tekstur atau susunan.¹⁸ Persepsi kedalaman, merupakan proses penginterpretasian informasi dua dimensi menjadi informasi tiga dimensi.

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

4. Proses dan Sifat Persepsi

Menurut Muhammad Iqbal ada beberapa sifat yang menyertai suatu proses persepsi, yaitu:

- (1) Konstansi (menetap), dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda.

¹⁷ Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...h, 40.

¹⁸ Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...h, 41.

(2) Selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.

(3) Proses organisasi yang selektif, beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.¹⁹

Sedangkan Sunaryo menyatakan bahwa persepsi dapat melewati tiga proses, yaitu sebagai berikut:

- (1) Proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera.
- (2) Proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris.
- (3) Proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.²⁰

Menurut Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu terjadinya stimulasi alat indera dan ditafsirkan, sebagai mana penjelasan di bawah ini:²¹

1. Obyek yang dipersepsi

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat

¹⁹ Muhlammad Iqbal, *Mubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013), h. 12-13.

²⁰ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), h. 98

²¹ Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 76.

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2. Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

Menurut Baihaqi secara umum ada beberapa sifat persepsi, antara lain:²²

1. Bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsang indera manusia menerima 3 milyar perdetik, 2 milyar di antaranya diterima oleh mata.
2. Persepsi merupakan sifat paling asli, merupakan titik tolak perbuatan kesadaran.
3. Dalam persepsi tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin hanya sebagian, sedangkan yang lain cukup dibayangkan.
4. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman berarti pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam kehidupan sebelumnya.

²² Baihaqi, *Psikiatri, Konsep Dasar dan Gangguan – Gangguan*. (Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 36-37.

5. Manusia sering tidak teliti sehingga dia seringkeliru, ini terjadi karena sering ada penipuan dibidang persepsi. Sesuatu yang nyata pada bayangan. Selain itu adapula ilusi persepsi yaitu persepsi yang salah sehingga keadaannya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya
6. Persepsi sebagian ada yang dipelajari dan sebagian ada yang bawaan. Persepsi yang sifatnya dipelajari dibuktikan dengan kuatnya pengaruh pengalaman terhadap persepsi. Sedangkan yang sifatnya bawaan dibuktikan dengan dimilikinya persepsi ketinggian pada bayi.
7. Dalam persepsi, sifat benda yang dihayati biasanya bersifat permanent dan stabil, tidak dipengaruhi oleh penerangan, posisi, dan jarak.
8. Persepsi bersifat prospektif, artinya mengandung harapan.
9. Kesalahan persepsi bagi orang normal, ada cukup waktu untuk mengoreksi, berbeda dengan orang yang terganggu jiwanya.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.²³

Partai politik sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta

²³ Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*. (Jakarta: Gramedia. 2010), h. 430.

merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.²⁴

Menurut Surbakti partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶ Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.²⁷

²⁴ Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik..*, h. 430.

²⁵ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 2012), h. 116.

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1

²⁷ Timothy, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, (CA: Stanford University Press. 1998), h. 23

Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

2. Fungsi Partai Politik

Di Indonesia partai politik mempunyai fungsi, hak , dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu fungsi partai politik yang terdapat didalam pasal 34 ayat (3) huruf a yakni melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang Partai Politik adalah sebagai sarana:²⁸

- (1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- (2) Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 tentang Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik yaitu sebagai berikut :²⁹

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (Interest Aggregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (Interest Articulation).

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kaderkader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan

²⁹ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama, 2008), h. 405-409

mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apa bila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Gabriel A. Almond dalam Cholisin dan Nasiwan mengemukakan fungsi partai politik meliputi : sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuatan kebijakan.³⁰

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:³¹

- (1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

³⁰ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 112.

³¹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1

- (2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusankeputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsifungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

3. Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai apa masa yang akan datang yang hendak diwujudkan

bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik. Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuan-nya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat.³²

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu .³³

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - (a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³² Sudijone, *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Semarang Press. 1995

³³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik

(d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

(a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

(b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi.

Negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (publik policy). Negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik adalah alat yang baik untuk melakukan hal tersebut.³⁴

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Sebagai suatu partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan

³⁴ Reilly Ben, *Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia...*, hlm. 25.

jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimete) dan damai.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.³⁵

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat

³⁵ Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Grafika, 2008), h. 27.

atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

³⁶ Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 (2009), h. 637.

Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.³⁷

Suharizal mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kwalotas demokrasinya terpenuhi dengan baik.³⁸

Prihatmoko juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).³⁹

³⁷ Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol 1 No 2 (2016)

³⁸ Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 38.

³⁹ Prihatmoko, *Mendemokrasikan Pemilu Dari Sistem Sampai ke Teknik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 34.

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut. Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, menurut Rozali pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:⁴⁰

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.
4. Mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk

⁴⁰ Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 23.

mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴¹

Menurut Pramusinto asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku

⁴¹ Prihatmoko, *Mendemokrasikan Pemilu Dari Sistem Sampai ke Teknik...*, h. 35.

⁴² Pramusinto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009), h. 29.

menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

6. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Di dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal lima ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nyaitu meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- b. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- e. Pelaksanaan kampanye.
- f. Pelaksanaan pemungutan suara.
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

- h. Penetapan calon terpilih.
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab :⁴³

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut.
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya.
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik.
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya.

⁴³ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2006), h. 4-5

8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “trade off”. Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien.

Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah. Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.⁴⁴

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara

⁴⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), h. 115

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni : 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah 2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah 3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah.⁴⁵

Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban (democraticcivility), yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita – cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, dan meminimalisasi terjadi perbenturan (clash) diantara berbagai kepentingan.⁴⁶

Dari segi hasil, pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan – kekuatan politik lokal melainkan juga memiliki hubungan sinergis dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila semua elemen eksekutif, legislatif, dan

⁴⁵ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), h. 16

⁴⁶ ibid

partai politik, lokal dan nasional membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme check and balance sejalan dengan semangat demokrasi.⁴⁷



⁴⁷ ibid

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahanannya.⁴⁸ Penyajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri, Adapun penelitian ini dilakukan langsung di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁵⁰ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan faktor-faktor

⁴⁸ Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 4.

⁴⁹ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

⁵⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵¹ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵²

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁵³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari aparatur gampong, tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁵⁴ Data primer dapat berupa data lisan maupun data secara tulisan. Adapun data primer yang digunakan dalam

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 171.

⁵² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h. 92.

⁵³ Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

⁵⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, h. 132.

penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁵⁵

Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel 3.1.

⁵⁵ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*h.56.

⁵⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*,h. 118.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Nama-Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Aparatur Desa	Syarwan Zaitim	Geuchik Desa Pulo Kambing	2019-2025
2		Jasmarita	Sekretaris Desa Pulo Kambing	2019-2025
3		Asrizal	Kaur Desa Pulo Kambing	2019-2025
4		Rahmani	Kasi Pemerintahan Desa Pulo Kambing	2019-2025
5		Ratna Sari	Kaur umum dan tata usaha	2019-2025
6		Mega Syahputra	Kepala Dusun Desa Pulo Kambing	2019-2025
7	Tokoh Masyarakat	Misbah, S. Ag	Camat Kluet Utara	2020 - sekarang
8		Mawardi	Imeum Mukim Sejahtera Kluet Utara	2020 – 2025
9		M. Amin	Imeum Mukim Asahan Kluet Utara	2020 – 2025
10		T. Bulthini	Imeum Mukim Kuala Bau Kluet Utara	2020 – 2025
11		M. Fadhil	Kelapa Desa Limau Purut	2022 – 2028
12		Tgk. Sudirman	Kepala Desa Kota Fajar	2019 – 2025
13	Masyarakat	1 orang	Desa Pulo Kambing	-
14		1 orang	Desa Pulo Kambing	-
15		1 orang	Desa Pulo Kambing	-
16		1 orang	Desa Pulo Kambing	-
17		1 orang	Desa Kota Fajar	-
18		1 orang	Desa Kota Fajar	-
19		1 orang	Desa Kota Fajar	-
20		1 orang	Desa Kota Fajar	-
			20 orang	

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁷ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.⁵⁸

Kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah

⁵⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174.

ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.⁵⁹

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.⁶⁰



⁵⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi..., h. 174.

⁶⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi...,h. 177.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kluet Utara

Nama Kecamatan : Kluet Utara

Ibu Kota Kecamatan : Kota Fajar

Kabupaten : Aceh Selatan

Provinsi : Aceh

Luas Kecamatan : 14.656,20 Ha

Jumlah Kemukiman : 3 Mukim

Tinggi Tempat DPI : 2-14 Meter LU : 3 225 ” BT : 97 9 12

Batas-Batas Kecamatan

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kec. Kluet Tengah
- b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Samudra Hindia
- c. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kec. Pasie Raja
- d. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kec. Kluet Selatan.

Tabel 4.1 Kuas Kecamatan Menuru Desa dan Jenis Penggunaan Lahan

No	Gampong	Sawah	Ladang	Kolam	Perkebunan
1	Kedai Padang	80,00	-	-	40,00
2	Pasie Kuala Bau	125,00	-	1,00	50,00
3	Suaq Geringgeng	75,00	-	-	40,00
4	Simpang Lhee	50,00	-	-	30,00
5	Simpang Empat	125,00	-	-	60,00
6	Jambo Mayang	180,00	4,00	2,00	80,00
7	Limau Purut	48,00	4,00	-	12,00
8	Pulo kambing	135,00	15,00	-	-
9	Kampung Paya	160,00	-	6,00	120,00
10	Krueng Batu	700,00	600,00	-	11,00

11	Gunung Pulo	90,00	20,00	10,00	607,00
12	Pulo Ie	129,00	-	-	260,00
13	Krueng Batee	75,00	17,00	2,00	14,00
14	Pasie Kuala Asahan	113,00	-	3,00	142,00
15	Fajar Harapan	64,00	-	5,00	22,00
16	Krueng Kluet	125,00	-	-	65,00
17	Alur Mas	125,00	20,00	2,00	124,00
18	Kampung Tinggi	75,00	-	-	-
19	Kampung Ruak	250,00	-	100,00	120,00

Tabel 4.2 Jarak Desa dari Ibukota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten

No	Gampong	Jarak (KM) Dari Ibu Kota Kecamatan	Jarak (KM) Dari Ibu Kota Kabupaten
1	Kedai Padang	3,00	37,00
2	Pasie Kuala Bau	4,00	38,00
3	Suaq Geringgeng	3,00	37,00
4	Simpang Lhee	2,00	36,00
5	Simpang Empat	0,00	34,00
6	Jambo Manyang	2,00	32,00
7	Limau Purut	1,00	35,00
8	Pulo kambing	4,00	38,00
9	Kampung Paya	5,00	39,00
10	Krueng Batu	4,00	38,00
11	Gunung Pulo	6,00	31,00
12	Pulo Ie	3,00	31,00
13	Krueng Batee	4,00	30,00
14	Pasie Kuala Asahan	8,00	36,00
15	Fajar Harapan	5,00	31,00
16	Krueng Kluet	6,00	40,00
17	Alur Mas	10,00	44,00
18	Kampung Tinggi	7,00	41,00
19	Kampung Ruak	8,00	42,00

Sumber: BPS Kecamatan Kluet Utara Dalam Angka, 2021.

Tabel 4.3 Karakteristik Gampong di Kecamatan Kluet Utara

No	Gampong	Status Desa	Kemiskinan (Miskin/BukanMiskin)	Kemampuan (Swadaya/Swakarya)
1	Kedai Padang	Desa	Miskin	Swakarya
2	Pasie Kuala Bau	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
3	Suaq Geringgeng	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
4	Simpang Lhee	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
5	Simpang Empat	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
6	Jambo Manyang	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
7	Limau Purut	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
8	Pulo kambing	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
9	Kampung Paya	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
10	Krueng Batu	Desa	Miskin	Swasembada
11	Gunung Pulo	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
12	Pulo Ie	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
13	Krueng Batee	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
14	Pasie Kuala	Desa	Miskin	Swakarya
15	Fajar Harapan	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
16	Krueng Kluet	Desa	Bukan Miskin	Swakarya
17	Alur Mas	Desa	Miskin	Swakarya
18	Kampung Tinggi	Desa	Miskin	Swakarya
19	Kampung Ruak	Desa	Miskin	Swakarya

B. Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

Pemilihan umum Bupati Aceh Selatan tahun 2018 (selanjutnya disebut Pilkada Aceh Selatan 2018) merupakan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Setiap pasangan calon (paslon) wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu 15% kursi DPRK (5 kursi) atau 15% suara Pileg 2014 (17.126 suara) untuk calon dari jalur partai politik dan 3% dari jumlah penduduk (6.908 dukungan) yang tersebar di

minimal 50% jumlah kecamatan (9 kecamatan). Pilkada Aceh Selatan 2018 diikuti oleh 7 paslon sebagai berikut:

Tabel 4.5 Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Partai Politik Pendukung Pada Pemilu Kabupaten Aceh Selatan, 2018

Nomor Urut	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Parpol Pengusung	Jumlah Suara/Dukungan
1	Tengku Husin Yusuf	Mustafiril	Perseorangan	6.908 orang (3%) / 9 kecamatan (50%)
2	Azwir	Tengku Amran	1. Hanura (2 kursi) 2. PKB (1 kursi) 3. PDIP (1 kursi) 4. PNA (1 kursi)	5 kursi (15%)
3	Zulkarnaini	Muhammad Jasa	Perseorangan	6.908 (3%) / 9 kecamatan (50%)
4	Darman	Baital Makmur	Perseorangan	6.908 (3%) / 18 kecamatan (100%)
5	Teuku Sama Indra	Harmaini	1. Demokrat (5 kursi) 2. PPP (3 kursi) 3. PAN (3 kursi) 4. Nasdem (2 kursi) 5. Gerindra (1 kursi) 6. Golkar (1 kursi)	15 kursi (50%)
6	Mirwan	Zirhan	1. Partai Aceh (5 kursi) 2. PKPI (4 kursi) 3. PBB (1 kursi)	10 kursi (33%)
7	Karman	Afdhal Yasin	Perseorangan	6.908 (3%) / 9 kecamatan (50%)

Sumber: KPU Aceh Selatan, 2018.

Pilkada Aceh Selatan 2018 dimenangkan oleh Paslon No.2 Azwir-Tengku Amran. Berikut adalah rekapitulasi suara Pilkada Aceh Selatan 2018:

Tabel 4.6 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Pada Pemilu Kabupaten Aceh Selatan, 2018

Kandidat	Jumlah	Persentase
Tengku Husin Yusuf-Mustafiril	5.799	4,45%
Azwir-Tengku Amran	46.667	35,85%
Zulkarnaini-Muhammad Jasa	1.396	1,07%
Darman-Baital Makmur	1.454	1,12%
Teuku Sama Indra-Harmaini	37.608	28,89%
Mirwan-Zirhan	33.972	26,10%
Karman-Afdhal Yasin	3.284	2,52%
		100%
Suara sah	130.180	98,83%
Suara tidak sah	1.535	1,17%
		100%
Partisipasi pemilih	131.715	84,21%
Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya	24.696	15,79%
Pemilih terdaftar	156.411	100%

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Pandangan masyarakat terhadap partai politi dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 tentu tidak bisa dilepaskan dengan para elit partai yang terlibat selama proses Pemilu berlangsung, mulai dari masa kampanye hingga hari pemilihan. Para elit partai yang ikut dalam Pilkada Aceh Selatan tersebut baik sebagai calon kepala daerah (Bupati), anggota DPRK yang diusung oleh Partai bersangkutan maupun para tim sukses pemenangannya. Keterlibatan partai politik inilah yang membuat pandangan masyarakat lebih cenderung dalam

rangka memenangkan Partai tertentu dalam Pilkada Aceh Selatan tahun 2018. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap partai politik peserta Pilkada Aceh Selatan.

Namun, tidak semua masyarakat Kecamatan Kluet Utara memberikan pandangan positif terhadap partai politik termasuk untuk kalangan elit pemenangan Partai tertentu dalam Pilkada Aceh Selatan tahun 2018, melainkan juga sebagian pemilik memiliki pandangan negatif. Hal ini sebagaimana terlihat dari beberapa hasil temuan di lapangan terkait pandangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara yang menjadi pemilih terhadap partai. Berikut adalah pandangan umum masyarakat, khususnya di Kecamatan Kluet Utara terhadap partai politik pada Pilkada Aceh Selatan.

1) Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Ditinjau dari Pengalaman Sejarah

Masyarakat Kecamatan Kluet Utara dalam menentukan pilihannya terhadap partai tidak bisa dilepaskan dari aspek hubungan kedekatan sejarah yang diketahuinya terkait partai tertentu, seperti partai-partai lokal yang ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Aceh sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan telah melahirkan pejuang-pejuang yang saat ini sebagian besar tergabung dalam partai lokal, seperti Partai Aceh, Partai SIRA, Partai PNA dan sebagainya.

Adanya sejarah perjuangan dari lokal terutama dalam mengisi perdamaian yang sudah dicapai, menjadi salah satu faktor yang membuat persepsi masyarakat Kecamatan Kluet Utara untuk memilih Partai lokal dalam Pilkada Kabupaten Aceh

Selatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang masyarakat Kecamatan Kluet Utara, sebagai berikut:

Saya pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan 2018 memilih para calon DPRK dan Bupati dari lokal yaitu calon bupati H. Mirwan yang diusung oleh Partai Aceh, karena bagi saya selaku orang Aceh hendaknya menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh para syuhada Aceh yang saat ini sebagian tergabung dalam lokal.⁶¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap partai lokal dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan adanya pertimbangan historis dari pada partai lokal itu sendiri. Masyarakat yang memilih partai lokal masih merasakan rasa simpati terhadap perjuangan pihak GAM dalam mencapai perdamaian Aceh. Ungkapan kemudian didukung oleh pernyataan salah satu masyarakat Kluet Utara lainnya, yang mengatakan sebagai berikut:

Bagi saya selaku orang Aceh kita sudah seharusnya perhatian terhadap partai-partai lokal. Hal ini dikarenakan selain anggota dalam partai lokal ialah mereka mantan pejuang Aceh merdeka, mereka jugalah yang sebagian setia memperjuangkan perdamaian Aceh, sehingga masyarakat bisa hidup tenang dari konflik.⁶²

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap partai politik dalam Pilkada Aceh Selatan masih tinggi dikarenakan pemilih memiliki rasa simpatisan terhadap perjuangan masa konflik hingga perdamaian. Sehingga bagi mereka perlu masyarakat untuk mendukung dan memenangkan partai lokal baik dalam pemilihan anggota DPRK di tingkat kabupaten maupun pemilihan Bupati.

⁶¹ Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

⁶² Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

2) Persepsi Masyarakat terhadap Politik Ditinjau dari Komunikasi Politik

Persepsi masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap Partai pada Pilkada Aceh Selatan juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perilaku pengurus partai yang mempraktekkan komunikasi politik yang dilakukan oleh kader partai terhadap masyarakat dalam agenda Pilkada Aceh Selatan. Dalam hal ini sebagaimana pengakuan dari salah satu tokoh masyarakat yang peneliti minta keterangan, sebagai berikut:

Jika diperhatikan komunikasi politik pihak tim sukses dari partai di Kecamatan Kluet Utara saat melakukan kampanye cenderung menyampaikan pesan-pesan berupa yang baik kepada masyarakat agar memilih partai yang bersangkutan, baik partai Nasional maupun partai lokal.⁶³

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya tekanan terhadap masyarakat dari komunikasi kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pemenang setiap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Begitu juga pengakuan dari informan lainnya, yang mengatakan sebagai berikut:

Saya tidak memilih partai lokal pada Pilkada Aceh Selatan tahun 2018, karena saya menilai selama ini apa yang dikampanyekan belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh partai lokal, seperti Partai Aceh.⁶⁴

Dari kedua pandangan tokoh masyarakat di atas, maka jelaslah bahwa pandangan masyarakat yang tidak memilih partai lokal dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan adanya komunikasi politik dalam berkampanye yang disampaikan oleh kader-kader partai lokal belum dapat direalisasikan dengan baik.

⁶³ Wawancara Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 26 November 2022

⁶⁴ Wawancara Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 27 November 2022

3) Persepsi Masyarakat terhadap Partai Politik Ditinjau dari Ketokohan

Kecenderungan pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ini tentu disebabkan oleh berbagai alasan, di antaranya sosok tokoh dari partai politik tersebut yang sebagian masyarakat menganggap telah memberikan jasa besar terhadap masyarakat. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh salah seorang masyarakat, bahwa:

Saya memilih dan memberikan dukungan terhadap partai tertentu, seperti Partai Demokrat dikarenakan elit politik yang menjadi calon anggota DPRK dan Bupatiya memiliki pengalaman yakni Bapak H. Saman Indra yang merupakan mantan bupati Aceh Selatan. Beliau selama ini telah berjasa membantu masyarakat banyak dalam berbagai bidang baik pembangunan sebagiannya selama mereka masih menjabat sebagai Bupati.⁶⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa baiknya pandangan masyarakat terhadap tokoh politik dari sebuah partai dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan disebabkan sosok tokoh seperti mantan Bupati Aceh Selatan H. Saman Indra yang diusung oleh partai Nasional Seperti Partai Demokrat dan Nasdem dan lain sebagainya yang dianggap telah memperlihatkan kuatnya perhatian terhadap masyarakat dalam memperjuangan partai tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh salah satu politikus dalam Kecamatan Kluet Utara, bahwa:

Bagi saya selaku kader partai politik, masyarakat selalu mengingat bagi siapa yang pernah berjasa terutama pihak-pihak yang dari partai tertentu pernah menang dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan baik Bupati maupun DPRK. Bahkan selama ini di Kecamatan Kluet Utara sudah banyak melahirkan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRK ditingkat kabupaten, bahkan selama menjabat anggota DPRK para tokoh dari beberapa politik aktif memberikan bantuan kepada Masjid dan juga memberikan sumbangan

⁶⁵ Wawancara Salah Satu Geuchik dalam Kecamatan Kluet Utara tanggal 27 November 2022

kepada parkir miskin dan anak yatim yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Kluet Utara.⁶⁶

Pandangan masyarakat sebagaimana keterangan salah satu politikus di atas memperlihatkan dukungan penuh terhadap elit dari berbagai partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Sosok elit politik yang dicalonkan oleh Partai Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tersebut ialah mereka yang tidak asing lagi bagi masyarakat, sehingga terdorong untuk mendukungnya dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan.

Selain memiliki tokoh politik yang membuat masyarakat bersikap positif terhadap elit partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan sosok para politikus juga sebagai tokoh agama Islam yang sangat religius. Artinya mereka juga aktif dalam mendidik masyarakat pada jalan agama seperti berceramah, kutbah jum'at dan kegiatan keagamaanya lainnya, sehingga sudah tentu masyarakat sebagai masyarakat yang mayoritas Islam memilih dan mendukung tokoh tersebut dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Kartini selaku masyarakat Kecamatan Kluet Utara, yakni sebagai berikut:

Sebagian tokoh-tokoh politi dari beberapa partai politik baik partai lokal maupun nasional adalah sosok politikus yang aktif juga dalam dakwah agama Islam. Politikus tersebut sering berceramah dan berkhotbah menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, jadi masyarakat termasuk saya pribadi berpandangan baik dan mendukungnya agar bisa menang dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara Salah Satu Tokoh Politik dalam Kecamatan Kluet Utara tanggal 28 November 2022

⁶⁷ Wawancara Salah Satu Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 24 November 2022

Keterangan yang mencerminkan sikap positif dari masyarakat terhadap elit partai politik hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hilmi selaku aparatur gampong, yakni sebagai berikut:

Sikap saya terhadap tokoh-tokoh partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan sangat mendukung terutama dikarenakan sosok sebagaimana pimpinan partai yang tidak hanya sebagai politikus yang baik melainkan juga sosok yang memberikan pendidikan baik kepada masyarakat ini. Jadi jika politikus yang luas pengetahuannya tidak diragukan lagi dalam memimpin masyarakat, Kabupaten Aceh Selatan.⁶⁸

Kedua keterangan di atas menjelaskan bahwa masyarakat berpandangan baik yang ditandai dengan sangat kuatnya dukungan terhadap tokoh partai politik tertentu. Hal ini bisa terjadi dikarenakan para elit politik yang menjadi para calon DPRK dan Bupati merupakan sosok tokoh yang ditunggu oleh masyarakat dikarenakan sifat dan kemampuan pengetahuan yang dapat membawa masyarakat Kabupaten Aceh Selatan ke arah yang lebih maju.

Ketokohan para kader partai politik yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan terutama yang dicalonkan sebagai wakil rakyat juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik pengusungnya. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat dalam Kecamatan Kluet Utara bahwa:

Selaku tokoh masyarakat yang juga menjadi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan memberikan hak pilih saya kepada elit politik yang diusung oleh partai politik mana saja. Hal ini dikarenakan tokoh yang mencalon dari partai tersebut ialah orang telah berjasa bagi masyarakat. Artinya para tokoh tersebut orangnya darmawan dan sering memberikan bantuan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pembangunan untuk kepentingan masyarakat seperti rumah ibadah, jalan dan sebagainya di Kecamatan Kluet Utara.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Aparatur Gampong Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

⁶⁹ Wawancara Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

Keterangan di atas menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah dikarenakan sosok tokoh yang dicalonkan sebagian memiliki jasa besar terhadap masyarakat setempat baik dalam mendukung kegiatan pembangunan rumah ibadah maupun kegiatan ekonomi dan peningkatan SDM masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

4) Persepsi Masyarakat Kluet Utara terhadap Manajemen Sumber Daya dan Strategi Kampanye Partai Politik

Aspek manajemen dan strategi partai politik juga menjadi pandangan tersendiri dari kalangan masyarakat Kluet Utara, termasuk partai-partai politik yang ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Adanya kalangan masyarakat yang memberikan pandangan positif dan negatif terhadap Partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dibenarkan oleh keterangan dari para tim sukses pemenangan Partai Aceh, yang menyatakan sebagai berikut:

Selama dalam kampanye Pilkada Kabupaten Aceh Selatan, saya selaku salah satu tim sukses pemenangan partai lokal melihat dua pola sikap masyarakat dalam pemenangan Partai lokal pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Pemilih yang memberikan sikap positif terhadap partai lokal rata-rata ialah mereka yang menjadi pendukung partai tersebut atau keluarganya yang pernah terlibat selama dalam konflik Aceh sehingga dengan adanya partai lokal menjadi partai dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan membuat mereka selalui memberikan dukungan positif. Selain itu para pemilih yang memiliki sikap positif ini ialah mereka yang dekat dan mengetahui sikap dan sifat para elit politik serta calon anggota DPRK dan bahkan pemilihan Bupati tahun 2018 lalu.⁷⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa masyarakat yang memberikan dukungan sikap positif terhadap partai politik, terutama partai lokal pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah mereka yang memiliki hubungan dengan partai

⁷⁰ Wawancara Politiku Partai Aceh di Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

tersebut serta kedekatan dan memiliki pengetahuan tentang para tokoh politik yang dijadikan calon DPRK dan Bupati pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Adanya sikap positif dikalangan masyarakat terhadap partai lokal tersebut ini juga terlihat dari keterlibatannya selama berlangsungnya masa kampanye. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh politikus di Kecamatan Kluet Utara, yakni sebagai berikut:

Jika kita lihat selama berlangsungnya masa kampanye Pilkada Kabupaten Aceh Selatan 2018 masyarakat Kecamatan Kluet Utara sangat antusias dan partisipasi melakukan sosialisasi pemenangan partai lokal. Masyarakat ikut serta dalam berbagai pertemuan dengan tokoh politik termasuk dengan calon bupati. Berbagai agenda yang dilaksanakan oleh tokoh politik dari partai masyarakat mengikutinya seperti doa bersama dan makan-makan bersama.⁷¹

Ungkapan di atas menunjukkan adanya pandangan positif dikalangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap partai politik terutama yang bersifat lokal. Antusias masyarakat bekerja sama dengan para politikus partai terlihat dengan terlibatnya masyarakat dalam berbagai agenda politik dan sosial yang diadakan oleh pengurus dan tim pemenangan partai tertentu dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan 2018. Pernyataan di atas didukung oleh ungkapan salah seorang masyarakat Kecamatan Kluet Utara yang menyatakan bahwa:

Saya saat masa kampanye Pemilu tahun 2019 dulu sangat mendukung pemenangan PA, makanya saya selalu ikut berkecimpung dalam segala kegiatan yang dibuat oleh PA baik yang ada di Kecamatan Syiah Kuala maupun di kecamatan lainnya yang ada dalam Kecamatan Kluet Utara. Tidak hanya itu saya juga aktif mengajak masyarakat lain untuk memberikan dukungan terhadap pemenangan partai PA dalam Pemilu tahun 2019.⁷²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat juga memberikan pandangan positif terhadap partai politik dalam Pilkada

⁷¹ Wawancara Politikus di Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

⁷² Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 19 November 2022

Kabupaten Aceh Selatan. Pandangan positif ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kluet Utara dalam memberikan dukungan kepada kegiatan politik selama kampanye yang dilakukan oleh politikus partai, bahkan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya mengikuti agenda yang ada di lokasi tempat tinggalnya melainkan juga di daerah lain sebagai bukti keseriusan masyarakat dalam upaya pemenangan partai dalam Pemilu tahun 2018.

Persepsi masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap elit politik partai pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh partai tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan sebagian saingan politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan yang melakukan *money politic* atau membagikan uang serta barang yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilih. Pandangan masyarakat terhadap pentingnya kemampuan ekonomi yang harus dimiliki partai pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan, dijelaskan oleh Hamdiyah selaku masyarakat, yakni sebagai berikut:

Bagi saya pribadi berpandangan bahwa kemampuan ekonomi di kalangan partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan sangatlah penting, karena saat ini masyarakat rata-rata memberikan suaranya baik untuk partai maupun pasangan calon dari partai tersebut bergantung pada seberapa besar uang yang diberikan oleh tim pemenangannya.⁷³

Keterangan dari Hamdiyah di atas menunjukkan bahwa adanya jasa ekonomi baik berupa uang maupun sejenis benda yang bermanfaat yang diberikan oleh elit partai kepada pemilih membuat sikap masyarakat untuk memberikan

⁷³ Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 27 November 2022

dukungan penuh terhadap elit pemenangan partai tersebut. Begitu juga sikap pemilih terhadap partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan.

Persepsi masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan yang ditentukan oleh faktor sumbangsih ekonomi kepada masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang menyatakan bahwa:

Bagi saya ketersediaan anggaran bagi partai dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Aceh Selatan itu penting, mengingat saingan partai dalam sebuah Pemilu berat terutama terkait pelaku *money politic*. Jadi pemilih akan memberikan sikap dukungan partai apabila partai tersebut ada memberikan bantuan kepada masyarakat, sebaliknya jika tidak adanya dukungan materil, maka dengan mudah pemilih bersangkutan menjatuhkan pilihannya kepada partai lain.⁷⁴

Sekalipun adanya pandangan pentingnya pemberian bantuan ekonomi kepada pemilih untuk membentuk sikap pemilih, namun tidak sedikit juga pemilih akan menyikapi negatif perihal *money politic* tersebut. Artinya sebagian pemilih tidak menyukai adanya perilaku *money politic* karena dianggap menyalahi hukum Agama Islam. Hal ini biasanya muncul dari para pemuka agama, seperti yang dikemukakan oleh pemuka agama di Kecamatan Kluet Utara, sebagai berikut:

Pandangan saya terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan sangat bergantung jalur kebaikan dan kejujuran dari para elit tersebut. Jika elit politiknya tidak lagi berjalan atas jalur hukum Islam, maka sikap saja tidak memberikan dukungan baik, sebaliknya jika jalan yang ditempuh ialah jalan kebenaran dan bukan melalui politik uang maka secara otomatis saya akan mendukung partai tersebut dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan.⁷⁵

Berdasarkan ungkapan di atas maka jelaslah bahwa persepsi masyarakat terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan sangat ditentukan

⁷⁴ Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 28 November 2022

⁷⁵ Wawancara Tokoh Agama Kecamatan Kluet Utara tanggal 30 November 2022

juga pada aspek kejujuran dalam bersaing dengan lawan politiknya, artinya tidak mengambil jalan-jalan kecurangan seperti *money politic* atau lain sebagainya.

Pandangan negatif terkait pesan kampanye dari pemilih terhadap partai politik juga ditemukan dari beberapa informasi yang disampaikan, seperti keterangan salah satu pemilih di Kecamatan Kluet Utara sebagai berikut:

Bagi saya pribadi terdapat beberapa pesan kampanye partai politik menjelang pemilu yang tidak pernah ditepati, di antaranya terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil alam Aceh yang akan dijadikan sebagai kesejahteraan masyarakat dan pesan ingin memajukan Pendidikan di Aceh juga belum dilaksanakan. Padahal hampir disetiap kampanye para politikus menjanjikan hal-hal tersebut.⁷⁶

Ungkapan pemilih di atas terlihat adanya pandangan masyarakat yang tidak lagi mempercayai pesan-pesan kampanye partai politik yang selama ini dianggap tidak pernah ditepati oleh partai politik saat sudah memenangi pemilu.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui adanya dua persepsi di kalangan masyarakat Kluet Utara terhadap partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan yakni pihak yang memberikan pandangan positif terhadap partai politik dan pihak yang berpandangan negatif terhadap partai politik. Pihak yang berpandangan positif terutama mereka yang memiliki simpati terhadap partai dan elit politik partai tersebut.

⁷⁶ Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

D. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terhadap Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Persepsi pemilih terhadap partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersumber dari diri masyarakat itu sendiri, maupun dari apa yang dilakukan oleh partai politik tersebut dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan.

1) Performance Partai

Faktor-faktor yang bersumber dari diri para pemilih tersebut dipengaruhi oleh faktor pandangan mereka terhadap elit politik selama masa kampanye khususnya. Adanya faktor dari diri pemilih ini sebagaimana hasil keterangan dari beberapa orang informan, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa:

Saya memilih partai politik tertentu dalam pemenangan pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ini dikarenakan keinginan saya sendiri bukan paksaan atau adanya imbalan dari pihak partai. Ini saya lakukan karena selama ini karena saya melihat partai-partai lain yang pernah memimpin dan menang dalam Pilkada sebelumnya kurang berhasil membawa Kabupaten Aceh Selatan ke arah lebih maju baik pendidikan maupun ekonomi masyarakat.⁷⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat partai politik tertentu dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah kehendak nurani masyarakat sendiri bukan karena paksaan atau adanya imbalan dari pihak partai itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh pemilih karena adanya pandangan terhadap nilai-nilai kepemimpinan para tokoh partai lain yang selama ini memimpin Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Selatan khususnya.

⁷⁷ Wawancara Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara tanggal 25 November 2022

2) Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi pemilih terhadap partai politik di Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah tingkat pendidikan pemilih di Kecamatan Kluet Utara belum tergolong tinggi, sehingga memiliki pengetahuan yang minim dalam bidang politik dalam menentukan pilihan pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tim sukses partai politik Nasdem yakni sebagai berikut:

Masyarakat Kluet Utara jika dilihat dari pendidikannya sebagian besar belum tergolong baik di bandingkan di tingkat daerah kabupaten, sehingga dalam menentukan pilihan politiknya sudah banyak pertimbangan, termasuk pandangan mereka untuk memilih sebuah partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan.⁷⁸

Keterangan di atas jelas mengakui bahwa dalam rangka memutuskan pilihan terhadap partai politik di kalangan masyarakat Kecamatan Kluet Selatan berbeda di tingkat daerah, mengingat sebagian besar pemilih di Kluet Utara belum berpendidikan bahkan minim dari kalangan akademisi dan juga sarjana. Sehingga bagi mereka gampang dalam menentukan pilihan terhadap partai politik.

Bukan hanya pendidikan, tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Kluet Utara yang sebagian besar belum masuk tingkat menengah atas juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh tim pemenangan Partai Aceh pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan yakni sebagai berikut:

Selama saya dan kawan-kawan mengadakan kampanye pra Pilkada Kabupaten Aceh Selatan 2018 sebagian masyarakat Kluet Utara sangat

⁷⁸ Wawancara Politikus Partai Nasdem di Kecamatan Kluet Utara tanggal 29 November 2022

menyenangi adanya politik uang. Bahkan sebagian jika tidak adanya bentuk *money politic* baik berupa uang, sembako dan lain sebagainya.⁷⁹

Ungkapan di atas menunjukkan faktor ekonomi juga menjadi penentu pemilih dalam menjatuhkan pilihanya terhadap partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Kluet Utara yang belum tergolong baik, sehingga segala bentuk tawaran *money politic* dianggap menguntungkan bagi masyarakat jika dibandingkan dengan masa depan Aceh Selatan dalam lima tahun ke depan.

3) Kedekatan Emosional dan Ketokohan

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah kedekatan emosional dan pengetahuan religius yang dimiliki oleh sosok tokoh partai politik tersebut, seperti aktif dalam melakukan dakwah disela tugas dan tanggungjawabnya sebagai politikus dan pejabat pemerintah. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh masyarakat yakni sebagai berikut:

Saya lebih memilih mendukung sebuah partai dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan tokoh yang dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati tersebut memiliki pengetahuan agama yang dapat membawa masyarakat tidak hanya dalam aspek duniawi semata melainkan juga membawa dan mengajak masyarakat untuk aktif melakukan perintah agama khususnya Islam.⁸⁰

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa faktor lain yang membuat masyarakat memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai tertentu pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan disebabkan oleh faktor agama atau idiologi

⁷⁹ Wawancara Politiku Partai Aceh di Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

⁸⁰ Wawancara Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

serta adanya hubungan emosional yang baik antara masyarakat dengan para elit politik yang dicalonkan oleh partai tersebut.

4) Kondisi Sosial Politik di Masyarakat dengan Manajemen Sumber Daya dan Strategi Kampanye Partai Politik

Persepsi masyarakat yang lebih berorientasi terhadap sebuah partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah juga disebabkan oleh faktor janji-janji selama masa kampanye yang dituangkan dalam program kerja dari pihak anggota calon DPRK dan bupati pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh masyarakat yakni sebagai berikut:

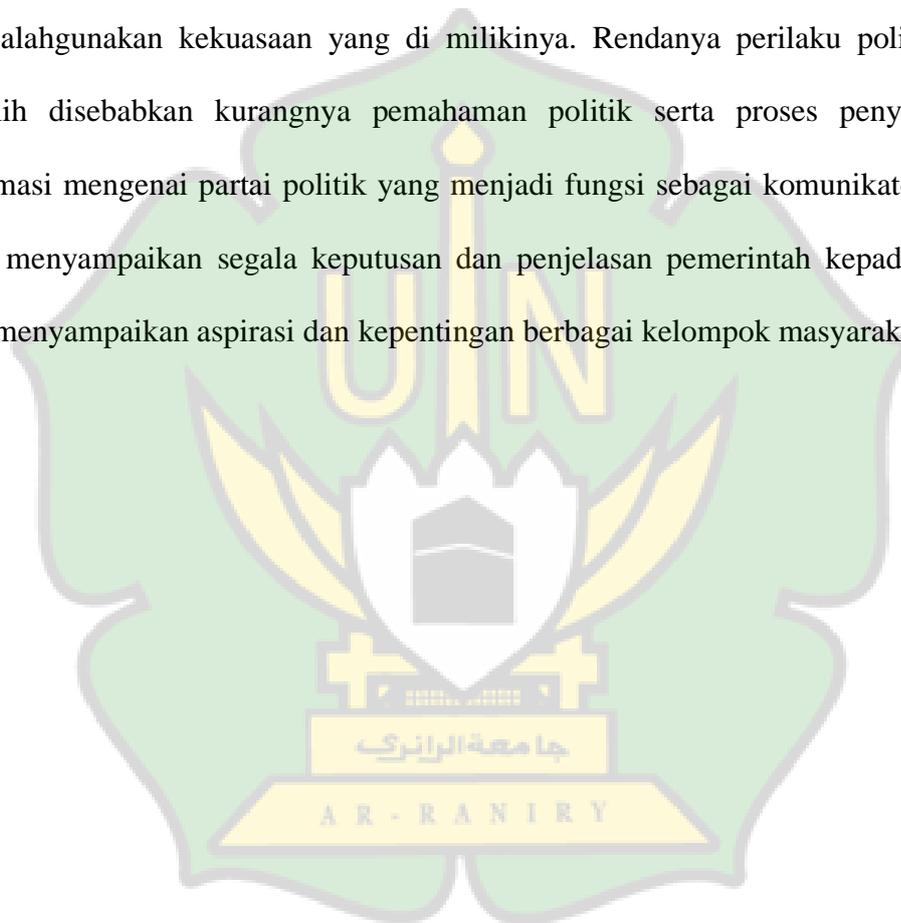
Pandangan saya memilih pasangan bupati dan wakil bupati dari suatu partai pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan ialah dikarenakan banyak janji kampanye yang disampaikan oleh para elit politiknya lebih berbobot untuk kemajuan masyarakat, seperti program pembagian Kartu Pintar untuk mendukung pendidikan anak SD, program hafidz Al-Qur'an, bantuan akan aktif diberikan kepada kelompok tani mengurangi pengangguran dengan melakukan pembinaan bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Kluet Utara terhadap partai politik pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dipengaruhi oleh faktor adanya janji kampanye yang membuat masyarakat tertarik untuk memilih pasangan yang diusung oleh partai tersebut dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan 2018. Janji-janji kampanye yang diberikan tersebut sangat sesuai dengan keinginan masyarakat baik di tingkat pendidikan anak, maupun ekonomi masyarakat setempat terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Pendidikan politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada individu atau kelompok untuk memahami sistem politik yang berlaku di

⁸¹ Wawancara Masyarakat Kecamatan Kluet Utara tanggal 20 November 2022

Aceh. Hal itu akan berguna bagi setiap individu dan kelompok, terutama dalam melakukan partisipasi politik dan dapat manfaat rekrutmen politik yang dilakukan oleh pemerintah atau partai politik. Situasi politik yang terjadi sekarang ini menjadi tolak ukur pemilih bahwa meskipun pemilihan umum ini dilaksanakan setiap periode namun tidak sedikit pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih menyalahgunakan kekuasaan yang di miliknya. Rendanya perilaku politik bagi pemilih disebabkan kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai partai politik yang menjadi fungsi sebagai komunikator partai yang menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada rakyat juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

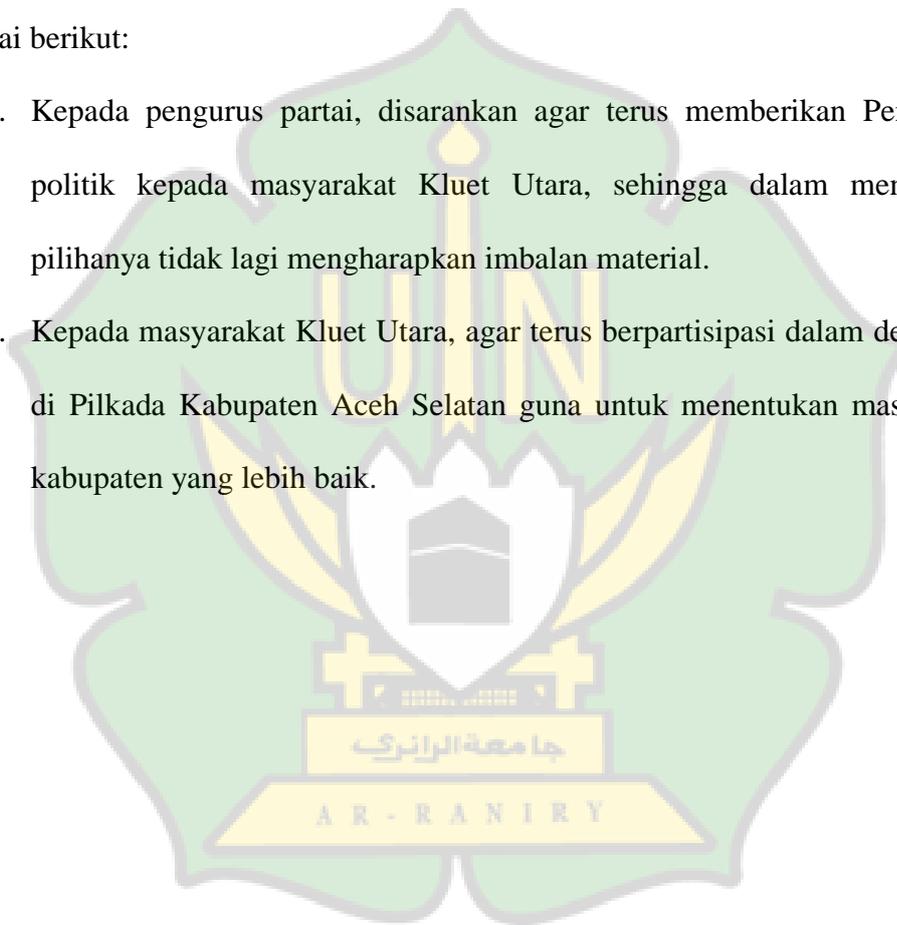
1. Persepsi masyarakat pemilih terhadap Partai Politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang memiliki persepsi baik dan sebagian tidak memberikan pandangan positif terhadap partai politik. Masyarakat yang berpandangan positif memberikan dukungan penuh terhadap Partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. Persepsi masyarakat yang baik ini didukung dengan adanya pandangan masyarakat terhadap perilaku elit politik dimasa kampanye baik marketing politiknya, kepribadian tokoh partai dan pengalaman masyarakat terhadap kepemimpinan sebelumnya dari partai bersangkutan. Sedangkan persepsi masyarakat yang negatif melihat berbagai kekurangan dari Partai politik seperti komunikasi dan pesan politik yang tidak baik, peran partai masih minim dalam pembangunan dan lain sebagainya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kluet Utara terhadap partai politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan antara lain program serta visi dan misi partai selama kampanye lebih menjanjikan dan meyakinkan pemilih, kedekatan emosional dan religius yang kuat di kalangan elit partai, kedarmawanan pasangan calon yang diusung partai,

kesamaan daerah dan suku serta adanya imbalan berupa uang dan fasilitas lainnya.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan saran, sebagai berikut:

1. Kepada pengurus partai, disarankan agar terus memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat Kluet Utara, sehingga dalam menentukan pilihanya tidak lagi mengharapakan imbalan material.
2. Kepada masyarakat Kluet Utara, agar terus berpartisipasi dalam demokrasi di Pilkada Kabupaten Aceh Selatan guna untuk menentukan masa depan kabupaten yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia, 2010
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Drever, *Persepsi Siswa*, Bandung: Grafindo, 2010
- Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- <http://aceh.tribunnews.com>, di akses pada 19 April 2021.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007
- Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Muhlammad Iqbal, *Mubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Pieter Merri Zan dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Sudijone, *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2004

Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

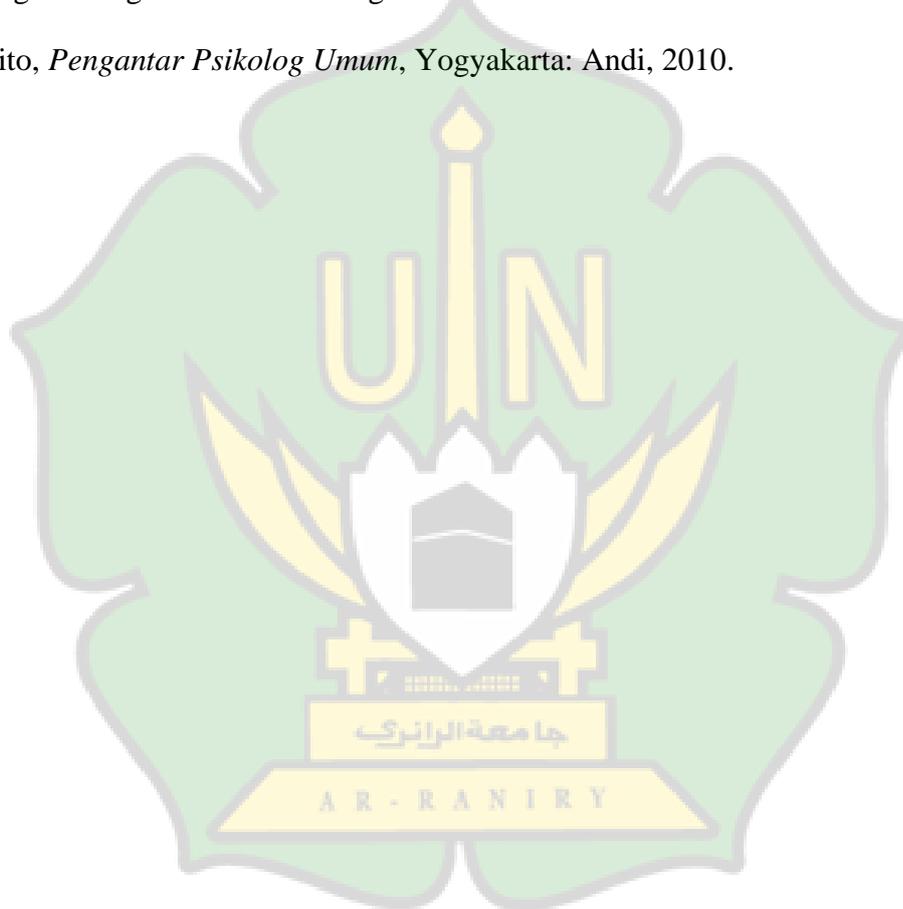
Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 2012

Timothy, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, CA: Stanford University Press. 1998

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1

Undang-Undang Nomor 31 tentang Partai Politik

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010.



INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

B. PERTANYAAN UNTUK APARATUR DESA

1. Partai apa yang bapak/ibu dukung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

2. Kenapa bapak mendukung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

3. Sejak kapan bapak/ibu mendukung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap partai-partai lain dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

5. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang partai yang bapak dukung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

6. Apakah pimpinan partai mempengaruhi pilihan bapak/ibu terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan? Jelaskan!

Jawab:.....

.....

7. Apakah kader partai mempengaruhi pilihan bapak terhadap partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

8. Apakah faktor ekonomi yang bapak/ibu dapatkan dari partai membuat bapak/ibu memilih partai tersebut?

Jawab:.....

.....

9. Bagaimana sikap bapak/ibu jika partai yang didukung melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

10. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika partai yang dipilih kalah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

11. Selaku aparatur desa, apa yang bapak/ibu pernah lakukan kepada masyarakat agar mengikuti pilihan bapak pada suatu partai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

C. PERTANYAAN UNTUK TOKO MASYARAKAT

12. Partai apa yang bapak/ibu dukung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

13. Kenapa bapak mendukung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

14. Sejak kapan bapak/ibu mendukung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

15. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap partai-partai lain dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

16. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang partai yang bapak dukung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

.....

17. Apakah pimpinan partai mempengaruhi pilihan bapak/ibu terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan? Jelaskan!

Jawab:.....

.....

18. Apakah kader partai mempengaruhi pilihan bapak terhadap partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

.....

19. Apakah faktor ekonomi yang bapak/ibu dapatkan dari partai membuat bapak/ibu memilih partai tersebut?

Jawab:.....

.....

.....

20. Bagaimana sikap bapak/ibu jika partai yang didukung melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

.....

21. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika partai yang dipilih kalah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

.....

.....

22. Selaku tokoh masyarakat apa yang bapak/ibu pernah lakukan kepada masyarakat agar mengikuti pilihan bapak pada suatu partai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

D. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

23. Partai apa yang bapak/ibu dukung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

n Jawab:.....

24. Kenapa bapak mendukung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

25. Sejak kapan bapak/ibu mendukung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

26. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap partai-partai lain dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

27. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang partai yang bapak dukung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....

28. Apakah pimpinan partai mempengaruhi pilihan bapak/ibu terhadap partai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan? Jelaskan!

Jawab:.....
.....
.....

29. Apakah kader partai mempengaruhi pilihan bapak terhadap partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....
.....
.....

30. Apakah faktor ekonomi yang bapak/ibu dapatkan dari partai membuat bapak/ibu memilih partai tersebut?

Jawab:.....
.....
.....

31. Bagaimana sikap bapak/ibu jika partai yang didukung melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....
.....
.....

32. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika partai yang dipilih kalah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....
.....
.....

33. Selaku masyarakat apa yang bapak/ibu pernah mengajak pihak lain untuk memilih partai tertentu dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan?

Jawab:.....
.....
.....

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1259/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik, pada tanggal 27 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|
| : Menunjuk Saudara | : | | |
| 1. Eka Januar, S.IP., M.Soc.Sc | : | | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Rizkika Lhena Darwin, MA | : | | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Mustasyar |
| NIM | : | 150801042 |
| Program Studi | : | Ilmu Politik |
| Judul | : | Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan |
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 8 Juni 2021

An. Rektor
 Dekan,


 Ermita Dewi



Disyahkan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan